

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan implikasi penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di kota Surabaya. Latar belakang dari penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menarik kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada Pemerintah Provinsi. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pertanyaan penelitian yaitu bagaimana politik desentralisasi dalam penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas dan sederajat di Kota Surabaya, bagaimana implikasi dari penarikan penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di kota Surabaya serta bagaimana respon Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kebijakan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori desentralisasi dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, dimana pemerintah pusat mengatur tentang pemerintahan konkuren salah satunya adalah pengelolaan sekolah menengah yang ditarik kepada tingkat provinsi sehingga kewenangan pengelolaannya tidak lagi pada pemerintah kabupaten/kota. Dari penarikan kewenangan ini, terdapat beberapa implikasi diantaranya adalah dampak administrasi, dampak politis, dan dampak anggaran. Atas kebijakan ini, terdapat beberapa respon yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus mematuhi dan melaksanakan Undang-Undang sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi pada struktur organisasinya. Bukan hanya itu saja, sebagai respon, Dinas Pendidikan Kota Surabaya lebih berfokus pada pengelolaan pendidikan dasar jenjang SD hingga SMP guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya.

Kata kunci: Pendidikan, Desentralisasi, Kewenangan, Kota Surabaya

ABSTRACT

This study aims to explain the implications of withdrawing authority of senior high school education management in Surabaya. The background of this writing is about the Laws of the Republic of Indonesia No. 23 of 2014 which draws the authority of secondary education management to the Provincial Government. In this research, there are three research questions, first, how is the politics of decentralization in the withdrawal of authority of senior secondary education in Surabaya, how the implication of withdrawal of authority of education management of senior high school level in Surabaya and how the education department's response to the policy. To answer the research questions, researchers used the theory of decentralization with qualitative methods. As set out in the Laws, where the central government regulates concurrent governance, one of them is the management of secondary schools drawn to the provincial level so that its management authority is no longer in the district / city government. From this withdrawal of authority, there are some implications such as administrative impacts, political impacts, and budgetary impacts. Based on this policy, there are some responses made by Surabaya's Education Department. As part of the Civil State Apparatus (ASN) Education Department of Surabaya must comply with and implement the Act so that there is a change of duties and functions on the organizational structure. Not only that, in response, the Education Department of Surabaya put more focus on the management of elementary education up to junior high school to improve the quality of education in Surabaya.

Key word: Education, Decentralization, Authority, Surabaya